

**SKRIPSI**

**PENGINGKARAN PUTUSAN PERDAMAIAN OLEH  
SALAH SATU PIHAK YANG BERPERKARA  
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat guna Mencapai Derajat  
Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**UTAMI SARASWATI**

**NIM: C 100.050.056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Garis Besar Haluan Negara salah satu manifestasi dari pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu pola pembangunan nasional secara menyeluruh, terarah, terpadu dan terus menerus yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan satu tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan.

Peranan hakim dalam menangani suatu perkara merupakan usaha menegakkan hukum dalam masyarakat lewat pengadilan sebagai pengambil keputusan. Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dalam mengakhiri sengketa atau perkaranya.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Bila seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya-tidaknya berusaha agar orang yang akan mendapat putusannya dapat diterima di lingkungannya. Pada prinsipnya suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

tidak dapat ditarik kembali dan harus dianggap telah terbukti kebenarannya. Namun masih juga diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu dan atas dasar yang kuat, putusan hakim tersebut diperiksa kembali.

Maksud dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan yang tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya.

Apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan melawan (*Verzet*) atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau tetap dan putusan itu telah memperoleh kekuatan yang pasti, yang mengikat. Dalam bahasa latin dikatakan “*Res Judicata Proveritate Habetur*” artinya, putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (apa yang diputus oleh hakim dianggap benar).

Kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubungan dengan tujuan acara perdata yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam persoalan gugatan terdapat dua pihak atau lebih yang satu sama lain sedang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa ini mereka mungkin minta bantuan teman atau kepala desa yang bersangkutan, dalam usaha mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar sidang secara damai sebelum perkara itu diajukan atau selama proses itu berlangsung dan kadang-kadang usaha tersebut berhasil pula. Dalam hal perkara sedang berjalan, kemudian gugatan dicabut karena telah ada perdamaian diantara para pihak. Apabila sengketa selesai secara

demikian, dikemudian hari sengketa yang sama dapat terjadi lagi antara kedua belah pihak yang sama.

Hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan pihak-pihak yang berperkara; bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat, maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa dapat selesai dengan tuntas, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun ringan. Daripada itu permusuhan antara dua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana biasanya pihak tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak yang

diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan secara paksa atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian :

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa
3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
4. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis

Dewasa ini berbagai macam kasus perdata sangat marak dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh hakim seringkali diingkari atau tidak dijalankan oleh para pihak yang sebenarnya masih belum puas dengan adanya putusan perdamaian tersebut. Hal ini sebagaimana dengan suatu kasus gugatan atas nama Sundoro Hosea di Pengadilan Negeri Surakarta.

Kasus ini bermula adanya pinjaman yang dilakukan oleh Mustaqimah kepada Sundoro Hosea sebesar tiga milyar rupiah yang nantinya digunakan untuk menambah modal. Namun setelah berjalannya waktu Mustaqimah

selaku peminjam hanya mampu membayar bunga hingga jatuh tempo pada akta pengakuan utang yang hanya sampai tanggal 13 Mei 2005.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Surakarta. Namun ternyata kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian. Meskipun demikian mengingat permasalahan ini adalah masalah utang piutang yang terkadang nominal agunan dengan pinjaman masih belum dapat menutup pinjaman, maka meskipun telah ada putusan perdamaian namun hal ini masih dapat dimungkinkan adanya pengingkaran yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh lagi melalui penulisan skripsi dengan judul “PENGINGKARAN PUTUSAN PERDAMAIAN OLEH SALAH SATU PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”. Hal ini disebabkan keingintahuan penulis terhadap suatu kasus pengingkaran mengingat pada kenyataannya, di masyarakat banyak terjadi putusan hakim masih tidak dilaksanakan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surakarta?

2. Bagaimana penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>1</sup>

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dari penelitian yang dilakukan akan selalu terkandung tujuan yang diharapkan dan pada kelanjutannya akan mampu memberikan manfaat bagi penulis, oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, 1994, Hal. 3

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan kegunaan pada kehidupan masyarakat.

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis.<sup>2</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat untuk mengembangkan ilmu hukum dan memberikan solusi lain terhadap kasus pengingkaran putusan perdamaian bagi masyarakat pencari keadilan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran yang lebih nyata dan berarti bagi ilmu hukum pada umumnya dan putusan hakim pada khususnya bagi Pengadilan, Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang.

#### **E. Metode Penelitian**

Suatu penelitian agar menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan mesti dilakukan secara sistematis, sehingga penentuan metode yang akan dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian.

---

<sup>2</sup>Hadari Nawawi dan H.M. Martini, *Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Yogyakarta : UGM Pres, Hal. 25



Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis karena pendekatan ini mengkaji tentang deskripsi pengingkaran putusan perdamaian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengingkaran putusan perdamaian dan upaya hukum dalam menghadapi pengingkaran putusan perdamaian.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat atau jenisnya penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan prosedur, proses dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Surakarta karena pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan tingkat kepadatan penduduk yang memungkinkan munculnya permasalahan yang lebih kompleks.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subyek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, guna mendapat penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder.

##### b. Data Sekunder

Merupakan data yang berupa dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, juru sita pengadilan dan para pihak. Dalam wawancara yang terpenting adalah mendapatkan informasi yang diperlukan melalui informan-informan yang tepat untuk dimintai informasinya<sup>3</sup>.

Dalam pelaksanaannya, wawancara tidak terpaku pada struktur sebagai pedoman yang kaku. Namun, bersifat luwes, pertanyaan menyesuaikan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1986. Hal. 53

situasi-situasi disaat wawancara berlangsung yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi saat wawancara.

Sifat yang luwes juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang jauh dan mendalam sehingga pertanyaan semakin terfokus dan menghasilkan jawaban yang detail dan rinci.

Wawancara melalui pencatatan situasinya lebih formal karena dalam wawancara informan menyediakan waktunya secara khusus untuk diwawancarai. Dan peneliti sudah menyiapkan panduan pertanyaan. Informan karena sifatnya lebih formal dimungkinkan wawancara juga dilakukan dengan cara non formal atau ngobrol santai kala informan sedang bekerja atau mengikuti acara rutin mereka. Hal ini dimaksudkan agar informan tidak menyadari bahwa dirinya sedang diwawancarai. Selain itu dimaksudkan agar informasi yang diperoleh adalah informasi yang benar dan tidak ditutup-tutupi.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu metode untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai peristiwa atau kejadian pada waktu lalu. Jurnal dalam penelitian tertentu bahkan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dimasukkan dalam kategori dokumen yang mendukung penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam melaksanakan analisis ini peneliti mengumpulkan data dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian tentang pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak yang berperkara. Karya ilmiah yang berhubungan dengan pengingkaran putusan perdamaian dan kepustakaan yang ada hubungannya dengan pengingkaran putusan perdamaian. Dalam analisis ini terdapat tiga komponen analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu mereduksi data, sajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Akhirnya disusun karya ilmiah yang bersifat deskriptif.

## **F. Sistematika Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
3. Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

### B. Tinjauan Tentang Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian
2. Keuntungan Penyelesaian Perkara dengan Perdamaian
3. Pelaksanaan Perdamaian

### C. Tinjauan Tentang Peningkaran Terhadap Perdamaian

### D. Tinjauan Tentang Putusan Perdamaian

1. Syarat Formal Putusan Perdamaian
2. Isi Putusan Perdamaian
3. Akibat Hukum Putusan Perdamaian

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkaran putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Penyelesaian perkara peningkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.

## B. Pembahasan

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.

## BAB IV : PENUTUP

### A. Kesimpulan

### B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN - LAMPIRAN